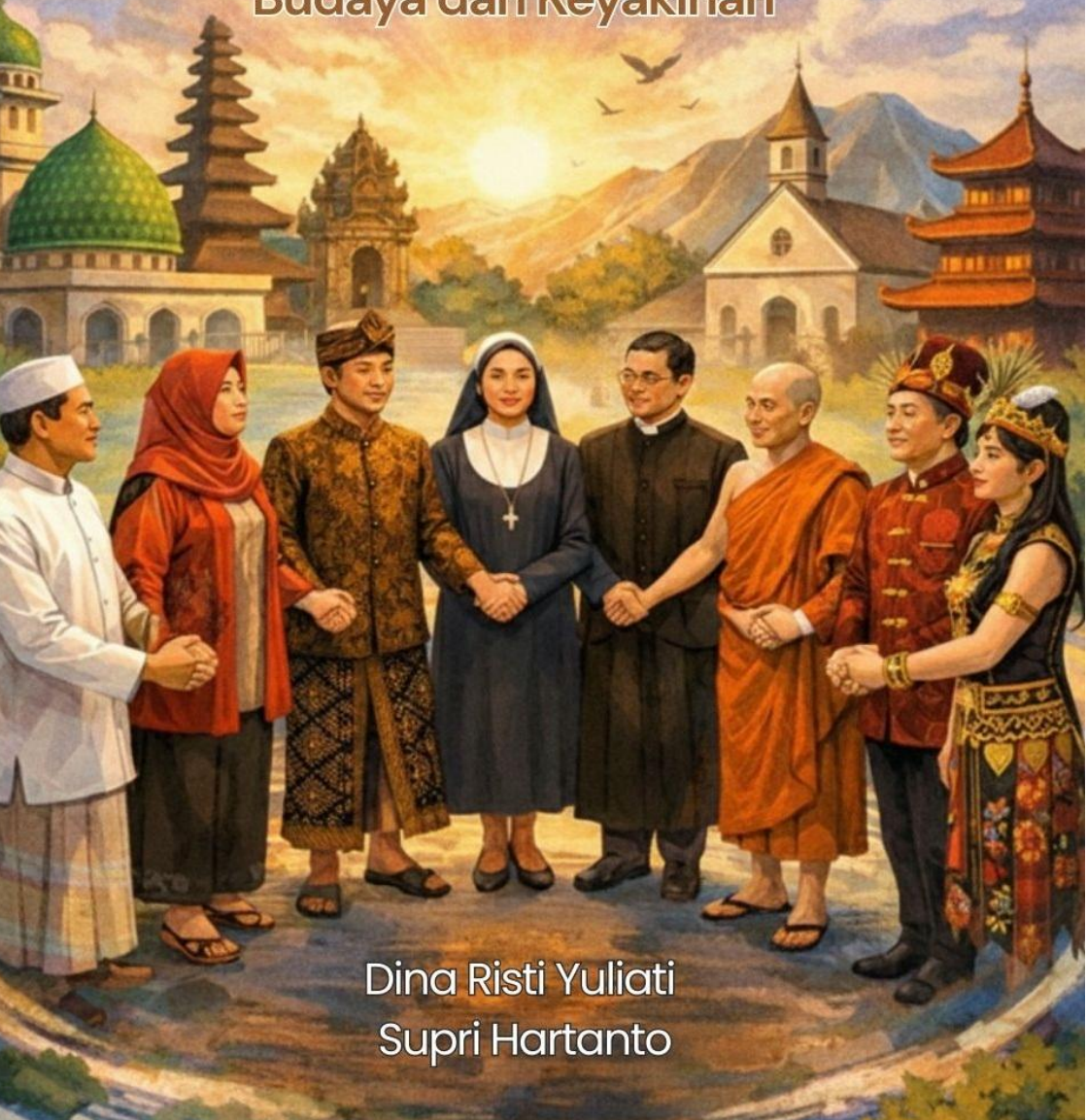


MEMBANGUN RUANG BERSAMA

Moderasi Religiusitas di Tengah Ragam
Budaya dan Keyakinan



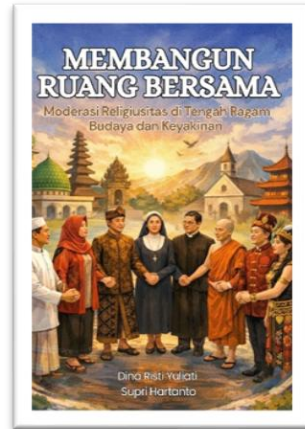
Dina Risti Yuliati
Supri Hartanto

MEMBANGUN RUANG BERSAMA

Moderasi Religiusitas di Tengah Ragam
Budaya dan Keyakinan



Dina Risti Yulianti
Supri Hartanto



MEMBANGUN RUANG BERSAMA

Moderasi Religiusitas di Tengah Ragam Budaya dan Keyakinan

Oleh:

Dina Risti Yulianti

Supri Hartanto

Penerbit:



TIGA EDUKASI GLOBAL
BELAJAR, BERKEMBANG, BERPRESTASI

**MEMBANGUN RUANG BERSAMA: Moderasi Religiusitas
di Tengah Ragam Budaya dan Keyakinan**

copyright © Januari 2026

Penulis : Dina Risti Yulianti
Supri Hartanto

Editor : Agus Herwanto

ISBN : 978-634-96654-0-7

Diterbitkan dan dicetak oleh:

CV. Tiga Edukasi Global

Jl. Letkol Soebadri Gang Triharjo Sleman Yogyakarta

Telp. 081215999824 / 081250023984

E-Mail : tigaedukasiglobal@gmail.com

Websites : <https://tigaedukasiglobal.co.id/>

Anggota IKAPI No. 203/DIY/2025

Hakcipta © 2026 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm

Halaman: ix + 83 hlm

Cetakan I, Januari 2026

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SINOPSIS

BUKU

Buku *Membangun Ruang Bersama: Moderasi Religiusitas di Tengah Ragam Budaya dan Keyakinan* mengulas pentingnya sikap moderat dalam beragama sebagai fondasi kehidupan sosial yang damai di tengah keberagaman Indonesia. Berangkat dari kegelisahan penulis terhadap meningkatnya polarisasi, disinformasi, dan kecenderungan eksklusivisme beragama, buku ini menegaskan bahwa pluralitas bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui dialog, saling pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan serta budaya.

Melalui pembahasan yang reflektif dan kontekstual, buku ini menawarkan moderasi religiusitas sebagai panduan etis yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, dengan menyoroti peran budaya lokal, nilai kemanusiaan, serta strategi membangun ruang bersama yang inklusif sebagai upaya memperkuat harmoni sosial dan persatuan bangsa. Karya ini diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa, pendidik, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap masa depan toleransi dan keberagaman Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Membangun Ruang Bersama: Moderasi Religiusitas di Tengah Ragam Budaya dan Keyakinan*. Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan dalam melihat realitas keberagaman Indonesia yang begitu kaya, namun pada saat yang sama dihadapkan pada tantangan polarisasi, misi informasi, dan menguatnya sikap eksklusif dalam beragama.

Sebagai bangsa yang dibangun di atas fondasi pluralitas, Indonesia membutuhkan ruang dialog yang tidak hanya memfasilitasi perbedaan, tetapi juga menguatkan sikap saling memahami. Moderasi religiusitas hadir sebagai salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Ia bukan sekadar konsep teoretis, tetapi panduan etis untuk berperilaku dan membangun kehidupan sosial yang damai di tengah realitas budaya dan keyakinan yang beragam.

Melalui buku ini, penulis berupaya menghadirkan pembahasan yang komprehensif mengenai pentingnya sikap moderat dalam beragama, peran budaya lokal sebagai penguat harmoni, serta strategi membangun ruang bersama yang inklusif. Harapannya, karya ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, pendidik, pengambil kebijakan, serta semua pembaca yang peduli terhadap masa depan keberagaman Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi nyata dalam upaya meneguhkan toleransi, memperkuat dialog, dan memelihara persatuan bangsa.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Yogyakarta, 18 Desember 2025

Dina Risti Yulianti

DAFTAR ISI

SINOPSIS BUKU.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I KONSEP DASAR MULTIKULTURALISME	1
A. Pengertian Multikulturalisme	1
B. Prinsip-Prinsip Multikulturalisme.....	4
C. Multikulturalisme Perspektif Sosial dan Politik.....	9
D. Sejarah Multikulturalisme di Indonesia	12
E. Tantangan Multikulturalisme di Era Modern	15
BAB II RELIGIUSITAS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	19
A. Konsep Religiusitas.....	19
B. Dimensi-Dimensi Religiusitas	24
C. Tradisi Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk	29
D. Religiusitas dan Identitas Sosial.....	33
E. Dinamika Interaksi Antarumat Beragama	36
BAB III MODERASI RELIGIUSITAS: KONSEP DAN NILAI-NILAI UTAMA	40
A. Pengertian Moderasi Religiusitas	40
B. Moderasi dalam Ajaran Agama-Agama Besar .	42
C. Moderasi sebagai Kerangka Etik dan Sosial	44

BAB IV IMPLEMENTASI MODERASI RELIGIUSITAS DALAM	
MASYARAKAT MULTIKULTURAL	47
A. Moderasi dalam Keluarga dan Komunitas Lokal	47
B. Peran Pendidikan dalam Moderasi.....	49
C. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat	51
D. Praktik Moderasi dalam Kehidupan Sehari-Hari	55
BAB V MEMBANGUN RUANG KEBERAGAMAN BERSAMA	60
A. Konsep Ruang Bersama Sosial	60
B. Membangun Komunikasi Antarbudaya.....	63
C. Strategi Menciptakan Kehidupan yang Inklusif ..	66
D. Praktik Resolusi Konflik yang Humanis.....	70
E. Penguatan Solidaritas di Tengah Perbedaan.....	73
PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA	80
BIODATA PENULIS	83

BAB I



BAB I

KONSEP DASAR

MULTIKULTURALISME

A. Pengertian Multikulturalisme

Multikulturalisme dipahami sebagai suatu pandangan, kebijakan, dan praktik sosial yang mengakui, menghargai, serta mengelola keberagaman budaya dalam masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap kelompok budaya baik yang berukuran besar maupun kecil memiliki hak yang sama untuk mempertahankan identitas, tradisi, dan nilai-nilai yang mereka anut. Multikulturalisme tidak hanya mencakup keberagaman etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun kehidupan yang harmonis di antara perbedaan tersebut. Dalam kerangka sosial modern, multikulturalisme muncul sebagai respons terhadap pluralitas yang semakin kompleks, mendorong masyarakat untuk menciptakan hubungan yang inklusif, saling menghargai, dan bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, multikulturalisme bukan sekadar pengakuan terhadap perbedaan, melainkan strategi

untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan setara bagi seluruh anggota masyarakat.

Multikulturalisme dipahami sebagai suatu kerangka sosial, politik, dan budaya yang bertujuan mengelola keberagaman masyarakat secara adil serta inklusif. Tariq Modood (2013) menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberagaman etnis, agama, dan identitas sosial yang ada di dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat modern membutuhkan kebijakan yang memberi kesempatan bagi setiap kelompok untuk menjaga identitas budayanya sekaligus berpartisipasi setara dalam ruang publik. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya mengatur perbedaan, tetapi juga berfungsi memastikan bahwa kelompok minoritas tidak mengalami marginalisasi dalam struktur sosial negara.

Multikulturalisme merupakan sebuah gagasan yang menggambarkan realitas sosial di mana beragam kelompok budaya meliputi etnis, agama, bahasa, adat istiadat, dan tradisi hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Konsep ini tidak hanya menyoroti keberadaan keragaman tersebut, tetapi juga bagaimana perbedaan itu

dihargai, dilindungi, serta dikelola agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bersama. Pada dasarnya, multikulturalisme berangkat dari pandangan bahwa keragaman bukan persoalan, melainkan potensi yang memperkaya pengalaman sosial manusia.

Dalam perkembangannya, multikulturalisme dikenal sebagai prinsip sosial yang menuntut pengakuan setara terhadap identitas budaya setiap kelompok masyarakat. Ide ini menolak superioritas satu budaya atas budaya lain dan menegaskan bahwa setiap komunitas budaya memiliki hak yang sama dalam mempertahankan nilai-nilai, tradisi, serta cara hidupnya. Dengan demikian, multikulturalisme mempromosikan ruang sosial yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berekspresi bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.

Konsep ini juga menunjukkan bahwa setiap individu merupakan bagian dari jaringan sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing. Oleh sebab itu, hubungan antarkelompok perlu dibangun di atas saling pengertian, penghormatan, dan dialog yang berkelanjutan. Masyarakat yang menerapkan multikulturalisme

bukan hanya menyadari adanya perbedaan, tetapi juga berusaha secara aktif memperkuat keharmonisan serta kerja sama antar kelompok budaya.

Secara praktis, penerapan multikulturalisme membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Diperlukan kebijakan yang mendorong perlindungan kelompok minoritas, penyediaan kesempatan yang adil, serta penegakan nilai-nilai keadilan. Upaya tersebut bertujuan agar keragaman.

B. Prinsip-Prinsip Multikulturalisme

Prinsip-prinsip multikulturalisme menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang mampu mengelola keragaman budaya secara sehat, setara, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana keberagaman dihargai, tetapi juga bagaimana negara, institusi sosial, dan warga negara memastikan bahwa setiap kelompok budaya memiliki ruang untuk berkembang. Dalam kajian kontemporer, multikulturalisme dipandang sebagai pendekatan dinamis yang memerlukan komitmen

aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga harmoni sosial dalam konteks keberagaman yang semakin kompleks (Modood, 2019).

Secara konseptual, prinsip pertama yang menonjol adalah pengakuan identitas budaya. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap kelompok budaya memiliki hak untuk mempertahankan tradisi, praktik, dan nilai-nilai yang membentuk identitas mereka. Modood (2019) menjelaskan bahwa pengakuan identitas bukan sekadar toleransi terhadap perbedaan, tetapi merupakan penghormatan aktif yang menempatkan identitas budaya sebagai bagian sah dari kehidupan publik. Dalam konteks ini, negara dan institusi sosial perlu memastikan bahwa identitas budaya tidak dihapuskan, baik melalui kebijakan maupun proses sosial yang menempatkan satu budaya sebagai dominan.

Prinsip kedua adalah keadilan dan kesetaraan sosial, yang menekankan perlunya menjamin akses yang setara bagi seluruh kelompok budaya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan layanan publik. Keadilan dalam konteks multikulturalisme tidak berarti perlakuan yang sama secara seragam, tetapi perlakuan yang

mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok tertentu agar dapat menikmati hak yang sama seperti kelompok lainnya. Konsep ini dikenal sebagai keadilan substantif, yaitu pendekatan yang melihat keadilan sebagai proses yang menyesuaikan perlakuan berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial kelompok budaya.

Prinsip ketiga adalah dialog antarbudaya, yang menekankan pentingnya interaksi terbuka dan saling menghormati antar kelompok budaya. Dialog memiliki peran penting dalam mencegah kesalahpahaman, mengurangi prasangka, serta membangun kesadaran lintas budaya yang lebih kuat. Dialog ini bukan hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga sebuah proses reflektif yang memungkinkan masyarakat memahami perspektif orang lain. Melalui dialog yang berkelanjutan, masyarakat dapat mengembangkan empati dan memperkuat kohesi sosial.

Prinsip keempat adalah inklusi sosial, yaitu upaya untuk memastikan bahwa seluruh kelompok budaya memiliki kesempatan yang sama dalam terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Fleras (2016) menegaskan bahwa inklusi sosial mencakup

keterlibatan aktif dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial, sehingga setiap kelompok budaya tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga memiliki suara yang bermakna dalam menentukan arah masyarakat. Dalam konteks ini, inklusi sosial menjadi strategi penting untuk menghindari marginalisasi dan memastikan representasi yang adil.

Prinsip kelima adalah perlindungan terhadap kelompok minoritas, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan identitas budaya minoritas dan mencegah diskriminasi sistemik. Banks (2017) menjelaskan bahwa perlindungan ini dapat berupa kebijakan pendidikan multikultural, undang-undang anti-diskriminasi, serta program pemberdayaan khusus bagi kelompok minoritas. Perlindungan ini bukan bentuk privilese, tetapi langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan historis yang dialami kelompok minoritas.

Selain lima prinsip utama tersebut, literatur mutakhir juga menyoroti prinsip adaptasi sosial, yaitu kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan dinamika keragaman budaya yang terus berubah. Dalam masyarakat global yang semakin terhubung, adaptasi sosial menjadi penting agar

masyarakat tetap responsif terhadap perubahan demografis, migrasi, serta perkembangan identitas budaya generasi baru. Prinsip ini menegaskan bahwa multikulturalisme bersifat dinamis dan memerlukan pembaruan kebijakan secara berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, multikulturalisme juga mencakup prinsip pemberdayaan budaya, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelompok budaya untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui program sosial, pelestarian bahasa daerah, pengembangan seni budaya, hingga pemberian ruang dalam kurikulum pendidikan formal. Prinsip ini membantu menciptakan kondisi di mana kelompok budaya dapat mempertahankan relevansi identitasnya di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip multikulturalisme tidak hanya membahas cara menghormati keragaman, tetapi juga bagaimana membangun struktur sosial yang adil, inklusif, dan mampu berkembang di tengah dinamika budaya yang kompleks. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik dan

pembentukan masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia tanpa memandang latar belakang budaya

C. Multikulturalisme Perspektif Sosial dan Politik

Multikulturalisme, dari sudut sosial, merupakan konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan identitas dalam masyarakat. Para peneliti sosiologis menjelaskan bahwa masyarakat multikultural berdiri di atas interaksi sosial yang berlapis, di mana kelompok-kelompok berbeda hidup berdampingan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nofal Liata dan Khairil Fazal misalnya menyatakan bahwa negara seperti Indonesia, yang beraneka ragam secara etnis, agama, dan budaya, harus mengembangkan pemahaman multikulturalisme agar konflik bisa diminimalisir dan keragaman bisa menjadi kekuatan sosial.

Pada level sosial, multikulturalisme tak hanya soal toleransi pasif, tetapi penciptaan ruang dialog yang aktif dan inklusif. pengelolaan keragaman budaya harus melalui strategi seperti pendidikan multikultural, dialog antarbudaya, dan kebijakan inklusif agar dampak positif—seperti saling

pengertian dan kerjasama, dapat termaksimalkan, sementara risiko konflik atau isolasi budaya bisa diminimalkan.

Secara politik, multikulturalisme berkaitan erat dengan kebijakan negara yang mengakui identitas kolektif dari kelompok-kelompok budaya. Arie Setyaningrum dalam studinya menjelaskan bahwa multikulturalisme sebagai identitas kolektif bisa menjadi dasar kebijakan politik: negara perlu melindungi dan mewakili keragaman budaya dalam proses politik agar semua kelompok merasa diakui. Namun, dia juga mencatat bahaya “hegemoni budaya”: meski multikulturalisme diadopsi sebagai kebijakan, praktik politik diskriminatif terhadap kelompok tertentu masih bisa terjadi jika tidak ada keadilan struktural.

Tantangan utama dalam penerapan multikulturalisme di ranah negara adalah menjaga solidaritas kewarganegaraan. Sebagai contoh, penelitian oleh Zahra Nabilah dkk. (2024) menunjukkan bahwa meskipun keragaman budaya di Indonesia sangat besar, kurangnya toleransi dan kesadaran bersama bisa melemahkan persatuan nasional. Dalam konteks ini, multikulturalisme bukan hanya soal pengakuan budaya, tetapi juga soal

integrasi sosial-politik yang memungkinkan warga dari semua latar belakang berpartisipasi aktif dalam politik dan kehidupan publik.

Dari perspektif pendidikan dan nilai kewarganegaraan, Multikulturalisme juga berfungsi sebagai landasan moral dan budaya. Misalnya, dalam pendidikan kewarganegaraan, konsep Bhinneka Tunggal Ika (sebagai jati diri nasional) dipandang sebagai wujud multikulturalisme negara Indonesia. Model multikultural seperti ini memperkuat karakter bangsa dan menjaga persatuan tanpa harus menghapus ragam budaya lokal.

Multikulturalisme juga dipandang sebagai nilai politik yang lebih dalam sebuah prinsip yang mendorong negara untuk mengakui hak-hak identitas kelompok, memberikan representasi politik, dan menciptakan kebijakan yang tidak diskriminatif. Purwanto (2025) dalam analisisnya menyebut empat jenis multikulturalisme: oposisi, dominan, liberal, dan multikulturalisme mainstream, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda dalam kebijakan publik dan hubungan sosial.

Namun, dalam praktiknya, multikulturalisme menghadapi berbagai hambatan. Ketidaksetaraan ekonomi, konflik identitas, dan dominasi satu

kelompok atas kelompok lain bisa melemahkan ideal multikultural. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang cermat, multikulturalisme bisa menjadi sumber ketegangan alih-alih kohesi.

D. Sejarah Multikulturalisme di Indonesia

Sejak masa klasik Nusantara, konsep multikulturalisme sudah tumbuh secara alami dalam struktur sosial masyarakat. Faktor geografis kepulauan yang tersebar mendorong interaksi antar-suku dan budaya yang berbeda, sementara pengaruh eksternal seperti ajaran agama dan perdagangan memperkaya wajah sosial Nusantara. Penelitian modern menunjukkan bahwa keberagaman ini tidak muncul secara tiba-tiba: migrasi, pertukaran budaya, dan kawin campur antar kelompok menjadi elemen dasar pembentukan identitas multikultural di masa lampau.

Memasuki era kolonial Belanda, dinamika multikultural menjadi lebih kompleks. Struktur kekuasaan kolonial menempatkan kelompok etnis dalam hierarki sosial tertentu, tetapi sekaligus mewariskan keragaman budaya yang kuat. Pada periode ini, pendidikan lokal dan agama turut

memperkuat pluralitas sosial. Maka dari itu, meskipun ada tekanan peleburan identitas oleh kekuasaan kolonial, keragaman tetap dipertahankan oleh komunitas setempat.

Setelah kemerdekaan Indonesia, nilai multikultural semakin dipadukan dengan ide nasionalisme. Semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" secara konseptual menyatakan bahwa perbedaan (etnis, bahasa, agama) adalah bagian dari identitas nasional yang utuh. Dalam pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai multikultural digunakan sebagai landasan membangun karakter bangsa yang menghormati keragaman, sekaligus memperkuat persatuan.

Pada era Orde Baru, terdapat kecenderungan untuk menyatukan identitas melalui kebijakan "satu bangsa, satu identitas nasional." Meski demikian, latar pluralitas etnis dan agama tidak hilang sepenuhnya; interaksi multikultural terus berlangsung di ranah lokal dan pendidikan. Sebagian pemikir mengkritisi model peleburan identitas ini, karena berpotensi mengabaikan kekayaan budaya lokal.

Momentum Reformasi 1998 membawa perubahan besar terhadap wacana

multikulturalisme di Indonesia. Kebebasan politik yang lebih luas dan tumbuhnya demokrasi memungkinkan kelompok-kelompok etnis dan agama menyatakan identitas kolektifnya secara lebih terbuka. Dalam kerangka ini, pendidikan multikultural menjadi semakin penting — nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan inklusivitas mulai dimasukkan dalam kurikulum sejarah dan kewarganegaraan.

Secara khusus, perkembangan pendidikan Islam juga mencerminkan sejarah multikulturalisme. Penelitian oleh Idris (2022) mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia melewati beberapa fase: dari masa penjajahan Belanda yang diskriminatif, masa Jepang, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Dalam setiap fase, ajaran Islam tentang toleransi dan persaudaraan menjadi unsur penting dalam pembentukan masyarakat multikultural.

Lebih jauh, mulainya pengembangan kurikulum berbasis multikulturalisme mengindikasikan bahwa negara melihat keragaman sebagai aset pendidikan. Kurikulum seperti ini didesain dengan basis filosofis dan psikologis agar siswa bisa memahami nilai-nilai

multikultural sesuai dengan perkembangan kognitif mereka.

Tantangan modern multikulturalisme di Indonesia tidak bisa diabaikan. Sebagian peneliti menyatakan bahwa meski nilai bawaan multikultural sangat kuat, implementasinya dalam pendidikan dan kebijakan publik masih menyisakan masalah seperti pemahaman yang dangkal, kurangnya sarana dialog antarbudaya, dan risiko eksklusivitas kelompok.

E. Tantangan Multikulturalisme di Era Modern

Di era modern, multikulturalisme di Indonesia dihadapkan pada dilema antara pengakuan budaya lokal dan identitas kewarganegaraan. Penelitian oleh Nasoha dkk. (2024) menunjukkan bahwa semakin kuatnya kesadaran budaya lokal membuat sebagian komunitas menuntut pengakuan yang lebih spesifik dari negara. Namun, tuntutan tersebut bisa melemahkan kesetaraan dan kohesi nasional jika kebijakan publik tidak dirancang dengan cermat.

Globalisasi dan arus budaya asing juga menjadi tantangan serius bagi multikulturalisme. Produk budaya luar dan nilai-nilai modernisasi berpotensi mengikis tradisi lokal. Sebagai contoh, Siregar dkk.

(2024) menjelaskan bagaimana globalisasi memengaruhi identitas budaya lokal melalui homogenisasi budaya. Sebagian peneliti juga menyoroti bahwa dalam konteks digital dan migrasi, multikulturalisme mengalami transformasi yang kompleks: teknologi dan media semakin mempercepat pertemuan antarbudaya, tetapi hal itu juga bisa memunculkan konflik baru dan resistensi sosial.

Selain itu, pendidikan multikultural menghadapi tantangan struktural. Pohan, Sitorus, dan rekan-rekannya (2024) menyoroti beberapa hambatan dalam pendidikan multikultural, seperti kesenjangan sosial-ekonomi, ketidaksetaraan akses ke teknologi, dan kesulitan mengimplementasikan kurikulum multikultural dalam konteks kelas yang heterogen. Fenomena ini diperparah oleh digitalisasi, di mana media sosial bisa menjadi arena polarisasi identitas dan penyebaran ujaran kebencian, jika kesadaran kewargaan tidak tumbuh dengan baik. Studi oleh Jannah, Hermawati, dan Sujaryanto (2025) mengamati betapa media sosial sekarang menjadi ruang tantangan toleransi karena efek "echo chamber" dan disinformasi.

Dalam konteks agama, modernisasi dan globalisasi juga menekan nilai-nilai tradisional keagamaan. Muyadi dan Noviani (2023) membahas bahwa pendidikan Islam kontemporer harus merespons perubahan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai multikultural dan toleransi, tetapi hal ini tidak mudah karena tekanan modernisasi dan sekularisasi terus berkembang.

Tak kalah penting adalah isu identitas nasional di tengah perubahan sosial global. Gulo (2024) menegaskan bahwa digitalisasi dan arus budaya global memicu proses “hiper-identitas”, di mana individu mencampurkan akar budaya lokal dengan pengaruh asing. Hal ini bisa melemahkan nilai-nilai kebangsaan jika tidak dikelola melalui pendidikan dan dialog yang sehat.

Akhirnya, tantangan multikulturalisme di era modern bukan hanya soal mempertahankan keragaman, tetapi juga soal bagaimana menjaga keadilan sosial-ekonomi. Penelitian Sosial (2024) menyebut bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Jika tidak diatasi, ketimpangan dapat memperkuat perbedaan identitas dan menggerus solidaritas antar kelompok.

BAB II



BAB II

RELIGIUSITAS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Konsep Religiusitas

Religiusitas merupakan konsep yang menggambarkan seberapa dalam hubungan seorang individu dengan ajaran agamanya, baik dalam bentuk keyakinan, praktik, maupun sikap moral. Dalam kajian keilmuan kontemporer, religiusitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai seperangkat ritual ibadah yang dilakukan secara formal, tetapi mencakup aspek internal seperti penghayatan spiritual, nilai-nilai etika, dan orientasi moral yang memengaruhi tindakan sehari-hari. Dengan demikian, religiusitas memiliki dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan dalam membentuk identitas seseorang.

Para ahli menyatakan bahwa religiusitas mempengaruhi cara seseorang memahami dirinya dan orang lain. Nilai-nilai agama tidak hanya menjadi pedoman kehidupan pribadi, tetapi juga memandu bagaimana seseorang bersikap dalam

masyarakat. Ketika dipahami secara utuh, religiusitas mendorong individu untuk berperilaku baik, jujur, adil, dan memperlakukan sesama dengan penuh empati. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral yang mampu memperkuat hubungan sosial, terutama dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

Dalam konteks Indonesia yang sarat keragaman etnis, agama, dan budaya, religiusitas memainkan peran yang sangat signifikan. Masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas baik biasanya menunjukkan perilaku toleran dan mampu menerima perbedaan sebagai sebuah kenyataan sosial. Penelitian Sari dkk. (2024) pada peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Taman menunjukkan bahwa pendidikan agama berbasis multikultural dapat memperkuat religiusitas siswa. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya sikap toleran, kemampuan memahami keberagaman, serta kesediaan bekerja sama dengan teman yang berbeda keyakinan.

Religiusitas juga dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terus berkembang sepanjang kehidupan manusia. Pada tahap tertentu, religiusitas dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, serta pengalaman sosial yang dialami seseorang dalam

pergaulannya dengan masyarakat. Karena itu, religiusitas bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial yang melingkupinya. Pendidikan agama, interaksi sosial, dan lingkungan budaya menjadi faktor yang sangat memengaruhi konstruksi religiusitas seseorang.

Dalam perspektif Islam, religiusitas berkaitan erat dengan pemahaman bahwa keberagaman adalah bagian dari kehendak Tuhan atau *sunnatullah*. Pandangan ini menegaskan bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda agar dapat saling mengenal dan bekerja sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Rozali dan Hanafi (2024) menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, religiusitas yang sejati tidak hanya menguatkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan sesama melalui sikap adil, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Religiusitas juga dikaitkan dengan konsep moderasi beragama atau *wasatiyyah*. Moderasi beragama mengajarkan bahwa sikap ekstrem atau berlebihan dalam memahami ajaran agama dapat menyebabkan disharmoni sosial. Oleh karena itu,

religiusitas yang moderat diperlukan agar umat beragama mampu hidup berdampingan secara damai. Rokib, Inayati, dan Maimun (2024) menemukan bahwa integrasi antara moderasi beragama dan multikulturalisme memunculkan perilaku sosial yang lebih inklusif dan toleran. Individu yang menghayati ajaran agama secara seimbang lebih mudah menerima keberagaman sebagai bagian integral dari kehidupan bersama.

Lebih jauh lagi, religiusitas tidak hanya mencakup aspek personal, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, nilai-nilai agama yang dihayati dengan benar dapat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi potensi konflik. Ketika ajaran agama dipahami sebagai pedoman untuk menebar kebaikan, maka keberagaman tidak lagi menjadi pemisah antar kelompok, tetapi justru memperkaya kehidupan sosial. Religiusitas kemudian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda melalui nilai universal seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan.

Religiusitas juga memiliki peran dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan

agama di sekolah tidak lagi hanya fokus pada hafalan ajaran atau pemahaman dogmatis, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial seperti kerja sama, sikap menghargai, dan perilaku santun. Melalui penguatan religiusitas, siswa didorong untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan nyata, termasuk dalam interaksi dengan teman yang berbeda latar belakang. Hal ini menjadi penting karena sekolah merupakan ruang sosial tempat anak belajar mengenali dan memahami keberagaman sejak usia dini.

Selain itu, religiusitas dapat menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan moral di tengah arus globalisasi. Budaya global yang masuk melalui media digital sering kali membawa nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Dalam situasi ini, religiusitas membantu individu tetap memiliki pendirian moral yang kuat. Penghayatan agama yang baik memberikan landasan etis yang membuat seseorang mampu menyaring pengaruh luar dan memilih nilai yang bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, konsep religiusitas tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan pendidikan. Ia merupakan aspek fundamental yang

membentuk karakter individu sekaligus menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam masyarakat multikultural, religiusitas yang dihayati secara inklusif dan moderat dapat menjadi kekuatan besar untuk memperkuat persatuan nasional, mengurangi konflik identitas, dan menumbuhkan kehidupan sosial yang berkeadaban.

B. Dimensi-Dimensi Religiusitas

Religiusitas sebagai sebuah konsep tidak hanya berbicara mengenai keyakinan seseorang terhadap ajaran agama, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling terhubung. Karena itu, para ahli mengembangkan beberapa dimensi religiusitas untuk memahami bagaimana agama dihayati dan diwujudkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teori paling berpengaruh adalah model dimensi religiusitas dari Glock & Stark, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti kontemporer. Dalam konteks masyarakat multikultural, dimensi-dimensi tersebut menjadi penting karena membantu memetakan bagaimana keagamaan berperan dalam membentuk sikap sosial dan hubungan antar kelompok.

Dimensi pertama adalah dimensi keyakinan (ideological dimension). Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang mempercayai doktrin, ajaran pokok, dan prinsip teologis yang dianut agamanya. Keyakinan menjadi fondasi dari seluruh perilaku keagamaan, sebab ia menentukan bagaimana seseorang memaknai Tuhan, kehidupan, dan relasi antar manusia. Keyakinan yang kuat biasanya mendorong seseorang untuk menjadikan ajaran agama sebagai pedoman moral dalam berbagai situasi. Penelitian Sari dkk. (2024) menunjukkan bahwa peserta didik dengan keyakinan agama yang mendalam cenderung menunjukkan perilaku toleran dan mampu menerima keberagaman.

Dimensi kedua adalah dimensi praktik keagamaan (ritualistic dimension). Dimensi ini mencakup ibadah formal seperti salat, puasa, misa, meditasi, pembacaan kitab suci, atau bentuk ritual lain sesuai ajaran agama masing-masing. Ritual merupakan sarana konkret yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Dalam kajian modern, praktik ritual tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai moral. penelitian Rokib dkk. (2024)

menegaskan bahwa praktik keagamaan yang dilakukan secara konsisten mampu memperkuat sikap moderat dan perilaku inklusif di lingkungan masyarakat.

Dimensi ketiga adalah dimensi pengalaman keagamaan (*experiential dimension*). Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman spiritual yang bersifat personal, seperti rasa dekat dengan Tuhan, ketenangan batin, rasa syukur, atau pengalaman religius yang memengaruhi cara seseorang memandang hidup. Pengalaman keagamaan ini seringkali menjadi motor penggerak terbentuknya karakter religius yang kuat, karena menyentuh sisi emosional dan spiritual individu. Penelitian modern menunjukkan bahwa pengalaman religius memiliki hubungan langsung dengan tingkat empati sosial dan kemampuan berinteraksi dalam masyarakat multikultural (Rozali & Hanafi, 2024).

Dimensi keempat adalah dimensi pengetahuan keagamaan (*intellectual dimension*). Dimensi ini menunjuk pada sejauh mana seseorang memahami ajaran agamanya, baik melalui pembelajaran formal di sekolah maupun melalui kajian mandiri. Pengetahuan agama yang baik akan membantu seseorang memahami makna ibadah, nilai etika,

serta konteks sosial ajaran agama. Dalam masyarakat multikultural, pengetahuan yang luas tentang ajaran agama cenderung membuat seseorang lebih terbuka dan tidak mudah terjebak dalam pemahaman sempit atau fanatik. Pohan dkk. (2024) menegaskan bahwa peningkatan literasi keagamaan di sekolah membawa dampak signifikan terhadap pembentukan sikap inklusif peserta didik.

Dimensi kelima adalah dimensi konsekuensi atau perilaku keagamaan (consequential dimension). Dimensi ini menekankan manifestasi ajaran agama dalam perilaku sosial sehari-hari. Individu yang religius tidak hanya terlihat dari ibadahnya, tetapi dari cara ia memperlakukan orang lain. Perilaku seperti kejujuran, kepedulian sosial, kerjasama, dan penghormatan terhadap perbedaan adalah cerminan dari religiusitas yang dewasa. Pada dimensi ini, sikap toleransi dan pengelolaan konflik sosial juga menjadi indikator penting. Penelitian Sari dkk. (2024) menunjukkan bahwa siswa yang memiliki religiusitas kuat pada dimensi ini lebih mampu menunjukkan sikap saling menghargai serta tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan agama maupun budaya (Sari dkk, 2024).

Dimensi-dimensi religiusitas ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Keyakinan yang kuat memperkuat praktik ibadah, praktik ibadah memperkaya pengalaman spiritual, pengalaman spiritual memotivasi pendalaman pengetahuan agama, dan seluruhnya bermuara pada munculnya perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai agama. Kombinasi ini membuat religiusitas menjadi konsep yang bersifat holistik dan kompleks, tidak dapat dipahami secara parsial. Karena itu, penelitian kontemporer selalu melihat religiusitas melalui berbagai dimensi tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, dimensi-dimensi religiusitas ini sangat penting sebagai dasar untuk membangun harmoni sosial. Religiusitas yang berkembang secara seimbang akan menghasilkan individu yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga mampu hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda. Dimensi-dimensi tersebut membantu individu untuk menempatkan nilai agama sebagai pedoman moral yang memupuk toleransi, kerja sama, dan sikap saling menghormati. Dengan demikian, religiusitas bukan hanya orientasi spiritual, tetapi juga kontribusi

nyata bagi terciptanya masyarakat yang damai dan berkeadaban.

C.Tradisi Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk

Dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman, tradisi keagamaan menjadi unsur yang sangat penting untuk menjaga hubungan sosial. Tradisi semacam ini tidak hanya menunjukkan bentuk ibadah, tetapi juga membangun pola interaksi yang memungkinkan berbagai kelompok agama hidup berdampingan. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Farha dan Prasetyo (2023) mengilustrasikan hal tersebut melalui tradisi Giliran di Kalisat, Temanggung. Dalam tradisi ini, penganut Budha, Islam, Katolik, dan Sapta Dharma berkumpul setiap Sabtu malam untuk saling berkunjung dan melakukan kegiatan keagamaan sederhana. Tradisi tersebut kemudian berkembang sebagai sarana memperkuat toleransi dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis (Farha & Prastetyo, 2023).

Kekayaan tradisi keagamaan dalam masyarakat majemuk juga tergambar dalam praktik religius masyarakat Jawa. Beragam ritual seperti kenduri, nyadran, dan rebo kasan menunjukkan

proses panjang akulturasi antara ajaran agama dengan budaya setempat. Susanti dan Rumondor (2024) menegaskan bahwa tradisi kenduri di Desa Kedungcino tidak sekadar ritual komunal, tetapi wujud perpaduan nilai spiritual Islam dengan adat Jawa yang menciptakan hubungan sosial yang lebih erat. Tradisi ini menjadi media penyampai nilai-nilai kebersamaan dan religiusitas kepada masyarakat (Susanti & Rumondor, 2024).

Contoh lain mengenai tradisi keagamaan dalam ruang multikultural terlihat dalam praktik Lelayu di Bulungcangkring, Kabupaten Kudus. Menurut penelitian Rifqi, Masudi, dan Mafud (2024), tradisi Lelayu melibatkan umat Islam dan Kristen dalam proses penghormatan terhadap warga yang meninggal. Warga Muslim biasanya mengadakan tahlil, sedangkan warga Kristen memberikan dukungan moral dengan hadir dan membantu keluarga yang berduka. Kolaborasi lintas agama tersebut berfungsi sebagai simbol solidaritas yang menegaskan bahwa hubungan sosial lebih kuat daripada batasan keagamaan (Rifqi dkk, 2024).

Selain tradisi lintas agama, beberapa struktur adat juga menjadi bagian dari sistem keagamaan dalam masyarakat majemuk. Di Toraja, keberadaan

Tongkonan berperan sebagai pusat kosmologis dan simbol identitas keluarga yang memuat nilai harmonisasi antaragama. Studi Richard (2024) menjelaskan bahwa Tongkonan bukan hanya rumah adat, tetapi juga institusi budaya yang membantu masyarakat Toraja menjaga relasi damai antara pemeluk agama berbeda yang hidup dalam satu komunitas. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar moderasi beragama yang menghargai perbedaan (Richard, 2024).

Peran tradisi keagamaan dalam masyarakat multikultural juga tercermin dalam model pendidikan agama yang adaptif. Penelitian Malindra, Muslimin, dan Syaifullah (2024) memperlihatkan bagaimana seorang tokoh agama, Kyai Muhammad Sukemi di Metro, Lampung, menggunakan pendekatan pendidikan yang mengajarkan sikap menerima perbedaan antaragama. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya sikap terbuka sehingga peserta didik mampu memahami keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial sehari-hari (Malindra dkk, 2024).

Dalam konteks teologis, pluralisme juga berfungsi sebagai landasan normatif bagi tradisi keagamaan yang inklusif. Mangalik, Siruru, Turu' Allo,

dan Admo (2024) mengemukakan konsep *Ogi Pluralisme*, yaitu gagasan teologis yang mengajak masyarakat untuk melihat keberagaman agama sebagai kenyataan yang perlu dipahami melalui sikap saling menghargai. Konsep ini diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial dan ritual lokal sehingga memperkuat hubungan antaragama (Mangalik dkk, 2024).

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi keagamaan dalam masyarakat majemuk bukan sekadar serangkaian upacara dan ritual, tetapi sebuah mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antarkelompok. Tradisi ini menjadi wadah untuk menanamkan nilai toleransi, gotong royong, dan rasa saling menghormati. Melalui keberadaan tradisi seperti Giliran, Lelayu, kenduri, serta sistem adat seperti Tongkonan, masyarakat Indonesia mampu mempertahankan kehidupan bersama yang damai di tengah keberagaman yang sangat luas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan masyarakat dalam mentransformasikan tradisi keagamaan sebagai jembatan sosial yang terus relevan di era modern.

D. Religiusitas dan Identitas Sosial

Religiusitas dan identitas sosial memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya berperan dalam membentuk cara seseorang memahami dirinya dan lingkungannya. Religiusitas yang mencakup keyakinan, praktik ibadah, serta ketaatan pada nilai-nilai agama dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam suatu kelompok. Misalnya, tradisi keagamaan seperti yasinan, tahlilan, atau kegiatan doa bersama di berbagai komunitas tidak hanya menjadi bentuk ekspresi spiritual, tetapi juga menjadi media yang mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan semacam ini mampu membangun solidaritas dan kohesi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memperkuat hubungan sosial, religiusitas juga dapat memengaruhi identitas sosial seseorang, yaitu bagaimana individu melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu. Beberapa studi menemukan bahwa nilai-nilai agama dan keterlibatan dalam komunitas keagamaan membentuk pola pikir, perilaku, hingga preferensi sosial, termasuk dalam keputusan-keputusan penting seperti pilihan pekerjaan atau aktivitas

ekonomi. Walaupun religiusitas secara langsung tidak selalu menentukan keputusan seseorang, nilai sosial dan jaringan pertemanan dalam komunitas agama terbukti dapat mendukung kepercayaan diri dan motivasi dalam kehidupan sosial maupun profesional.

Dari sisi psikologis, religiusitas juga berperan meningkatkan hubungan sosial karena nilai-nilai agama biasanya mendorong seseorang untuk berperilaku positif, menghargai orang lain, dan menjaga etika dalam pergaulan. Hal ini membuat individu lebih mudah diterima dalam lingkungan sosialnya dan menciptakan identitas yang selaras dengan norma-norma kelompok. Pada remaja, penelitian terbaru menunjukkan bahwa religiusitas yang tinggi, ditambah dengan dukungan sosial yang kuat, dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan rasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari.

Religiusitas adalah tingkah laku yang berhubungan dengan kehidupan beragama pada seseorang dan seberapa besar pengaruh keyakinan beragama terhadap dirinya serta keadaan hidupnya pada umumnya. (Ratnawati, 2016).

Istilah religiusitas dimaknai sebagai tingkah laku yang berhubungan dengan kehidupan beragama

pada seseorang, dan seberapa besar pengaruh keyakinan beragama terhadap dirinya, serta keadaan hidup secara umum (Ratnawati, 2015). Perkembangan dan pembentukan religiusitas remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri sendiri yang telah dibawa sejak lahir atau sering disebut sebagai faktor internal dimana dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia memiliki naluri beragama sejak mereka dilahirkan, selanjutnya adalah faktor eksternal yang meliputi segala sesuatu yang ada di luar pribadi yang mempengaruhi religiusitas (Sururin, 2004).

Definisi lain menyatakan bahwa religiusitas merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang dapat ditandai tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual tetapi juga dengan adanya keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai agama yang dianutnya (Suroso, 2001).

Adapun dimensi religiusitas yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu dimensi yang dikemukakan oleh Glock (Suroso, 1994). Secara terperinci menyebutkan lima dimensi religiusitas, yaitu: (1) Dimensi ideologis (ideological dimension) yaitu

tingkatan sejauhmana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya kepercayaan terhadap Tuhan, surga, dan neraka, (2) Dimensi intelektual (intellectual dimention) yaitu sejauh mana seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci. (3) Dimensi ritualitas (ritualistic dimention) yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misalnya shalat, zakat, berpuasa, dan haji. (4) Dimensi pengalaman (experiential dimention), yaitu perasaan-perasaan atau pengalamanpengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya perasan dekat dengan Tuhan, merasa dilindungi Tuhan, dan merasa doanya dikabulkan. (5) Dimensi konsekuensi (consequential dimention) yaitu dimensi yang mengukur sejauhmana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Misalnya apakah dia membantu teman yang sedang mengalami kesusahan (Amawidyati & Utami, 2007).

E. Dinamika Interaksi Antarumat Beragama

Dinamika interaksi antarumat beragama merupakan proses yang terus berkembang seiring

perubahan sosial, budaya, dan teknologi dalam masyarakat. Pada dasarnya, interaksi antaragama dapat berjalan harmonis bila didukung oleh sikap saling menghargai, komunikasi yang terbuka, dan kesadaran akan nilai kemanusiaan bersama. Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama cenderung stabil ketika masyarakat memiliki ruang dialog yang inklusif, seperti forum kerukunan, kegiatan sosial bersama, serta kolaborasi dalam penanganan isu-isu kemasyarakatan. Kegiatan kolaboratif ini membantu mengurangi prasangka, memperluas pemahaman terhadap keyakinan lain, dan membangun rasa percaya di antara kelompok agama yang berbeda.

Namun, dinamika tersebut tidak selalu berjalan mulus. Faktor seperti media sosial, politisasi identitas agama, dan penyebaran informasi yang tidak akurat kerap memicu ketegangan. Penelitian pada tahun 2024 menemukan bahwa intensitas penggunaan media digital dapat memperkuat stereotip jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik, sehingga meningkatkan risiko konflik antar kelompok keagamaan. Meskipun demikian, studi lain menunjukkan bahwa platform digital juga memiliki

potensi positif sebagai ruang dialog lintas agama yang dapat memperkuat toleransi apabila digunakan secara bijak melalui kampanye inklusif, edukasi keberagaman, dan penyebaran konten moderat.

Pada tingkat komunitas, interaksi antaragama berkembang melalui praktik sosial seperti gotong royong, edukasi multikultural, dan kerja sama dalam penanganan bencana. Aktivitas-aktivitas tersebut terbukti dapat menumbuhkan solidaritas lintas iman karena masyarakat lebih menekankan aspek kemanusiaan daripada perbedaan keyakinan. Penelitian di berbagai daerah multikultur Indonesia juga menegaskan bahwa pengalaman hidup berdampingan secara langsung menjadi faktor penting yang menumbuhkan toleransi dan memperkuat kohesi sosial.

Dengan demikian, dinamika interaksi antarumat beragama merupakan proses yang dipengaruhi oleh banyak aspek, mulai dari budaya, politik, media, hingga pengalaman sehari-hari dan dapat menghasilkan hubungan yang harmonis apabila masyarakat mengembangkan kesadaran untuk saling memahami, bekerja sama, serta menjaga ruang dialog yang damai.

BAB III



BAB III

MODERASI RELIGIUSITAS: KONSEP DAN NILAI-NILAI UTAMA

A. Pengertian Moderasi Religiusitas

Moderasi religiusitas merupakan sikap dan cara beragama yang menekankan keseimbangan dalam memahami, meyakini, dan mempraktikkan ajaran agama tanpa bersikap berlebihan atau ekstrem, baik dalam bentuk fanatisme yang mengarah pada intoleransi maupun sikap yang terlalu longgar hingga mengabaikan nilai-nilai agama itu sendiri. Konsep ini lahir dari kebutuhan masyarakat modern untuk mengelola keberagaman dengan cara yang sehat, harmonis, dan produktif, terutama dalam konteks sosial yang multikultural seperti Indonesia.

Moderasi religiusitas menekankan bahwa seseorang dapat tetap teguh menjalankan keyakinan agamanya, tetapi pada saat yang sama harus mampu menghormati perbedaan, membuka ruang dialog, serta menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam interaksi antarindividu. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa moderasi religiusitas berfungsi mendorong individu agar tidak

hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga kontekstual, yakni dengan mempertimbangkan realitas sosial, perkembangan zaman, serta kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat yang heterogen.

Moderasi religiusitas tidak bermaksud melemahkan komitmen keagamaan, melainkan memperkuat pemahaman bahwa agama mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Individu dengan sikap moderat biasanya menunjukkan karakter seperti toleransi, kemampuan bekerja sama lintas agama, keterbukaan pada dialog, serta penolakan terhadap kekerasan atau tindakan diskriminatif atas nama agama. Temuan penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa moderasi religiusitas berperan penting dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif, memperkuat hubungan antarumat beragama, serta menekan potensi konflik yang muncul dari perbedaan keyakinan.

Dengan demikian, moderasi religiusitas dapat dipahami sebagai fondasi penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis, karena mengajarkan umat beragama untuk tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual

sambil menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang saling menghargai dan jauh dari sikap ekstrem.

B. Moderasi dalam Ajaran Agama-Agama Besar

Dalam konteks masyarakat plural di Indonesia, prinsip moderasi beragama menjadi landasan penting dalam menjaga kerukunan antara umat beragama. Misalnya, dalam artikel “Moderasi Beragama sebagai Pendekatan dalam Pendidikan Islam Indonesia” oleh Badrul Arifin dan Hairul Huda, disebutkan bahwa moderasi beragama harus diinternalisasi melalui pendidikan — dengan menekankan pemahaman agama yang komprehensif dan konteks sosial, serta mendorong sikap saling menghargai perbedaan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari agar generasi muda tumbuh dengan toleransi dan menghormati keberagaman (Badrul & Hairul, 2024).

Selain itu, artikel “Moderasi Beragama, Tasamuh, dan Sinkretisme (Dinamika Sosial Keagamaan Umat Islam)” oleh Aurana Zahro El Hasbi dan Noor Fuady menekankan bahwa moderasi (atau *wasathiyah*)

dalam Islam meliputi nilai-nilai seperti toleransi (*tasamuh*), keseimbangan, serta penghormatan terhadap perbedaan, sebagai penangkal ekstremisme dan sebagai fondasi kerukunan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama dalam Islam tidak bertentangan dengan keterbukaan dan pluralisme, melainkan mendukung hidup berdampingan secara harmonis.

Contoh dari implementasi moderasi lintas agama juga ditemukan dalam masyarakat Hindu di Bali, sebagaimana dibahas dalam artikel “Moderasi Hindu dalam Tri Kerangka Agama Hindu di Bali” oleh Putu Ida Arsani Dewi. Dalam penelitian ini, praktik moderasi Hindu melalui tradisi dan norma lokal dijadikan dasar untuk membangun kerukunan antarumat beragama, menciptakan sebuah “Hindu Nusantara” yang menghargai keberagaman dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi tidak eksklusif untuk satu agama, melainkan bisa menjadi bahasa bersama di tengah masyarakat majemuk.

Dengan merujuk pada penelitian-penelitian seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa moderasi, sebagai sikap seimbang, toleran, dan menghormati perbedaan adalah prinsip etis dan sosial yang relevan untuk semua agama di

Indonesia. Moderasi beragama bukan hanya idealisme, tetapi juga realitas sosial yang dapat dijadikan fondasi harmoni dalam masyarakat plural.

C. Moderasi sebagai Kerangka Etik dan Sosial

Moderasi beragama telah banyak dipahami dalam literatur akademik sebagai kerangka etik dan sosial yang penting bagi masyarakat plural seperti di Indonesia. Misalnya, penelitian dalam artikel Moderasi Beragama dalam Islam menunjukkan bahwa moderasi, dikenal dalam istilah Islam sebagai *tawasuth*, *tawazun*, dan *i'tidāl*, mencakup pengakuan terhadap keberagaman, sikap toleran, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta keadilan dalam interaksi sosial; hal ini menjadikan moderasi sebagai prasyarat bagi kohesi sosial dan kerukunan antarkomunitas.

Di sisi lain, artikel Moderasi Beragama: Studi Pemikiran Pendidikan Islam Syamsul Kurniawan menjelaskan bahwa moderasi beragama dalam konteks pendidikan tidak hanya soal doktrin keagamaan, melainkan juga soal pembangunan karakter warga negara: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif

terhadap tradisi dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional.

Moderasi Beragama dalam Upaya Menciptakan Toleransi dan Rasa Persaudaraan di Kalangan Masyarakat Desa Tanjung Kubah Kabupaten Batubara menunjukkan bagaimana moderasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat desa: dengan menekankan sikap saling menghargai, penghindaran ekstremisme, serta membangun rasa persaudaraan, sebuah upaya konkret untuk merajut harmoni di masyarakat yang heterogen.

Dengan demikian, moderasi tampil tidak semata sebagai konsep moral abstrak, tetapi sebagai kerangka etik dan sosial yang nyata: menetapkan norma-norma keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penghormatan atas perbedaan, yang jika dilembagakan, dapat menjadi fondasi bagi perdamaian, keadilan sosial, dan kohesi antar-kelompok dalam masyarakat plural.

BAB IV



BAB IV

IMPLEMENTASI MODERASI RELIGIUSITAS DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

A. Moderasi dalam Keluarga dan Komunitas Lokal

Moderasi dalam kerangka keluarga dan komunitas lokal berperan sangat krusial sebagai fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis. Dalam ranah keluarga, misalnya, penelitian yang dipublikasikan di SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah menunjukkan bahwa keluarga berfungsi sebagai “madrasah pertama” di mana anak-anak dapat diperkenalkan pada nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, saling menghargai perbedaan, dan pengendalian diri, sejak dini; lewat pendidikan di rumah, komunikasi antar anggota keluarga, serta teladan orang tua, moderasi dapat tertanam kuat sebagai bagian dari karakter dan moral individu.

Moderasi beragama telah diterapkan sebagai basis kebersamaan dan harmoni melalui kearifan lokal. Studi di komunitas di Pulau Misool, bagian dari masyarakat adat di Raja Ampat, menunjukkan

bahwa praktik keagamaan dan kebiasaan sosial mereka mencerminkan moderasi: dalam berbagai aktivitas tradisional atau ritual bersama, penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan rasa saling menghormati tetap dijunjung tinggi, tanpa memandang latar agama masing-masing.

Hal serupa terjadi di daerah pedesaan, contohnya di desa di Kabupaten Jepara: melalui program komunitas yang menggunakan metode dialog interaktif dan partisipatif, warga berhasil memperkuat sikap toleran dan moderat antarkelompok, menghasilkan kerukunan dan modal sosial yang lebih kuat.

Di sisi lain, komunitas berbasis agama selain Islam juga menunjukkan bahwa moderasi dapat diperkuat lewat pendidikan agama dan pendekatan dialog; misalnya dalam studi di Kecamatan Lintong Nihuta, dimana pendidikan agama Kristen dijadikan sarana untuk menguatkan moderasi beragama di tengah masyarakat plural.

Semua ini menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya idealisme abstrak, melainkan suatu kerangka praktik sosial yang nyata, dimulai dari ruang paling kecil (keluarga), dan meluas ke komunitas lokal sebagai tatanan sosial yang mampu

mengakomodasi pluralitas, mencegah konflik, serta membangun solidaritas dan rasa saling menghormati.

B. Peran Pendidikan dalam Moderasi

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam menumbuhkan moderasi karena lembaga pendidikan merupakan ruang sosial tempat peserta didik belajar memahami keberagaman, membangun perspektif kritis, serta mengembangkan kepribadian yang seimbang. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* dijelaskan bahwa sekolah dan madrasah memiliki fungsi bukan hanya sebagai tempat transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai institusi pembentukan karakter, di mana nilai moderasi, seperti toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan, dapat ditanamkan melalui kurikulum, metode pembelajaran, serta kultur lembaga. Pendidikan yang mampu mempertemukan peserta didik dari latar belakang sosial dan agama yang berbeda memungkinkan munculnya interaksi yang mendorong pemahaman lintas identitas dan sikap tidak ekstrem.

Penelitian lain yang dimuat dalam Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan menegaskan bahwa pendidikan yang berorientasi pada nilai moderasi dapat memperkuat daya nalar peserta didik dalam menyeleksi informasi, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh ide-ide intoleran maupun propaganda ekstrem. Melalui pendekatan pembelajaran yang kritis dan dialogis, siswa dilatih untuk memecahkan masalah secara damai, menghargai sudut pandang orang lain, serta membangun sikap terbuka terhadap realitas masyarakat yang majemuk. Pendidikan yang demikian mendorong tumbuhnya budaya akademik yang sehat, yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual tetapi juga membentuk sensitivitas etis dalam kehidupan sosial.

Selain itu, kontribusi pendidikan dalam menumbuhkan moderasi diperkuat melalui peran guru dan dosen sebagai teladan nilai. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel yang terbit di Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, pendidik memiliki kapasitas untuk memengaruhi cara berpikir peserta didik melalui integrasi nilai moderasi dalam penyampaian materi, penyelesaian konflik di kelas, dan sikap profesional yang inklusif. Ketika guru

menunjukkan perilaku adil, menghargai keberagaman pendapat, dan mengedepankan dialog, peserta didik belajar memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian dari kehidupan bersama. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer konsep moderasi secara teoretis, tetapi juga mempraktikkannya sebagai budaya yang hidup dalam lingkungan belajar.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan berperan sebagai pilar utama dalam merawat moderasi: memperkuat identitas kebangsaan, membentuk kesadaran inklusif, serta mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Melalui sinergi kurikulum, budaya sekolah, peran guru, dan suasana pembelajaran, moderasi dapat ditanamkan sebagai nilai yang mengakar kuat, bukan hanya sebagai wacana normatif tetapi sebagai etos hidup yang menciptakan tatanan sosial yang damai dan saling menghargai.

C. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Tokoh agama dan tokoh adat memegang peran sangat penting dalam menjaga kohesi sosial

karena kedua figur ini memiliki otoritas moral yang kuat dalam komunitas. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Bimas Islam menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai rujukan etis bagi masyarakat dalam memahami ajaran agama secara proporsional, seimbang, dan tidak berlebihan. Melalui khutbah, pengajian, serta bimbingan pastoral, mereka mampu menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari realitas sosial yang harus diterima sebagai kehendak Tuhan. Para tokoh agama juga menjadi mediator ketika terjadi gesekan antarkelompok, sehingga nilai moderasi dapat digunakan sebagai landasan penyelesaian konflik yang damai. Penelitian tersebut menegaskan bahwa suara tokoh agama memiliki dampak langsung terhadap cara masyarakat menafsirkan ajaran agama, sehingga mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan ajaran secara inklusif dan menolak segala bentuk ekstremisme.

Dalam konteks adat dan budaya lokal, tokoh adat berperan sebagai penjaga kearifan tradisional yang selama berabad-abad telah menjadi pilar harmoni sosial di berbagai daerah. Studi yang terbit di Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya

menjelaskan bahwa norma adat seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama telah menjadi mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga keseimbangan hubungan antarwarga. Tokoh adat menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut dengan memediasi perselisihan, memberikan nasihat budaya, serta mengarahkan warga agar tetap menjunjung tinggi aturan adat yang menolak kekerasan dan sikap ekstrem. Dengan demikian, tokoh adat berfungsi sebagai stabilisator sosial yang memadukan tradisi lokal dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh adat juga menjadi elemen penting dalam memperkuat moderasi di tingkat komunitas. Dalam artikel yang diterbitkan oleh *Sosioireligius: Jurnal Kajian Sosiologi Agama* ditemukan bahwa sinergi kedua figur ini mampu menciptakan ruang dialog lintas identitas, terutama dalam masyarakat multikultural. Ketika tokoh agama menyampaikan pesan keagamaan yang inklusif dan tokoh adat menegaskan nilai-nilai lokal yang menolak permusuhan, masyarakat memperoleh dua legitimasi sekaligus: legitimasi moral-religius dan legitimasi sosial-kultural. Sinergi ini memperkuat ketahanan sosial terhadap

radikalisme, meminimalkan potensi konflik komunal, serta membangun kesadaran kolektif bahwa keberagaman merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan praktik moderasi di tingkat akar rumput sering kali ditentukan oleh seberapa kuat kolaborasi antara dua figur ini dalam membimbing masyarakat.

Lebih jauh, penelitian mutakhir dalam *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* mencatat bahwa tokoh agama dan tokoh adat juga berperan dalam transformasi moderasi dari nilai normatif menjadi praktik sosial yang konkret. Mereka mendorong program-program edukatif seperti dialog lintas iman, kegiatan sosial bersama, hingga revitalisasi praktik budaya damai yang melibatkan generasi muda. Pendekatan ini membuat nilai moderasi tidak hanya dipahami dalam tataran konsep, tetapi dijalankan sebagai gaya hidup sosial masyarakat. Melalui keteladanan, pidato publik, dan penguatan tradisi, keduanya mampu menanamkan nilai keseimbangan, penghormatan, dan toleransi sebagai prinsip hidup bersama.

D. Praktik Moderasi dalam Kehidupan Sehari-Hari

Di sejumlah komunitas di Indonesia, moderasi beragama telah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar wacana. Sebagai contoh, di Desa Tempur, praktik moderasi terlihat melalui program dialog lintas agama, kegiatan sosial bersama, dan pembelajaran partisipatif yang melibatkan seluruh warga tanpa memandang agama, sebuah upaya yang dikaji dalam artikel “Kampung Moderasi Beragama; Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Modal Sosial di Desa Tempur” (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui metode partisipatif dan keterlibatan warga, kesadaran toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan meningkat, warga dari latar agama berbeda mampu bekerja sama, saling menghormati, dan menjalin solidaritas dalam kehidupan sehari-hari.

Di konteks perkotaan, ada komunitas yang disebut Kampung Toleransi di Bandung, di mana moderasi dilembagakan melalui sikap saling menghormati praktik keagamaan dan pluralitas keyakinan. Dalam artikel “Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural: Studi Kampung Toleransi di Kota Bandung” (2023), ditemukan bahwa

warganya menjalankan aktivitas keagamaan dengan tetap menghargai agama orang lain, dan tidak memaksakan keyakinannya. Mereka hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, serta menjadikan pluralitas sebagai bagian normal dari kehidupan sosial, sehingga moderasi bukan sekadar teori, tetapi norma sosial harian.

Di desa lain, misalnya Desa Wonorejo di Situbondo, moderasi diwujudkan dalam harmoni kehidupan antarumat beragama meski penduduknya memeluk berbagai agama. Studi “Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)” (2023) menunjukkan bahwa sikap toleran, saling menghormati praktik beragama, dan penghargaan terhadap tradisi bersama telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga. Proses internalisasi nilai moderasi di sana berjalan melalui tiga faktor: kesadaran individu, budaya/tradisi lokal, dan peran agen sosial, sehingga moderasi menjadi bagian dari struktur sosial, bukan sekadar pilihan individu.

Praktik moderasi juga tampak dalam keseharian komunitas yang berbeda agama dan

latar belakang. Dalam penelitian “Terciptanya Toleransi Umat Beragama Hindu dan Islam Hasil Moderasi Agama di Desa Kayu Kebek Pasuruan” ditemukan bahwa umat Islam dan Hindu di desa tersebut bersama-sama menjalankan aktivitas keagamaan maupun sosial tanpa saling mendiskriminasi; mereka saling menghormati ibadah dan tradisi masing-masing, serta menjalin kerja sama dalam kegiatan sosial dan adat. Persahabatan, saling menghormati, dan pemahaman atas perbedaan adalah praktik harian, menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi fondasi kerukunan lokal.

Secara kolektif, temuan-temuan itu memperlihatkan bahwa moderasi, ketika dipraktikkan secara konsisten, membantu membangun masyarakat inklusif dan harmonis, memperkuat modal sosial, menumbuhkan toleransi dan rasa saling menghormati, serta menjadi pilar bagi stabilitas komunitas di tengah keberagaman. Moderasi bertransformasi dari konsep ke nilai hidup sehari-hari, menjadi bagian dari kebiasaan komunitas, dan menjadi landasan bagi hidup bersama, bukan sebagai toleransi minimal,

melainkan sebagai penghormatan aktif terhadap pluralitas.

BAB V



BAB V

MEMBANGUN RUANG KEBERAGAMAN BERSAMA

A. Konsep Ruang Bersama Sosial

Konsep ruang bersama sosial atau ruang publik/komunal (*social space/public space*) menggambarkan area, baik fisik maupun simbolik, di mana individu dari latar sosial, ekonomi, atau budaya yang berbeda dapat bertemu, berinteraksi, dan membangun relasi sosial tanpa sekat yang tajam. Dalam konteks perkotaan maupun komunitas, ruang bersama sosial memainkan peran penting sebagai “jembatan” sosial yang memungkinkan pertukaran ide, solidaritas, serta perasaan kebersamaan. Sebagai contoh, dalam artikel “Spektrum Ruang Komunal sebagai Wadah Interaksi Sosial bagi Penghuni pada Rumah Susun Sederhana Sewa di Jakarta” dikaji bagaimana ruang-komunal di rusunawa berfungsi sebagai arena bagi penghuni untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan membangun toleransi antarpenghuni meskipun mereka berasal dari latar berbeda.

Di sisi lain, ruang bersama sosial dalam bentuk permukiman tradisional atau kampung juga pernah dianalisis dalam penelitian “Kajian Pembentuk Ruang Interaksi Sosial Masyarakat Kampung Kota: Studi Kasus Koridor Jalan Tubagus Ismail Bawah, Bandung”, hasilnya menunjukkan bahwa koridor jalan, teras, gang, atau area semi-publik di permukiman bisa membentuk ruang interaksi yang kuat antarwarga, memperkuat *sense of community*, solidaritas tetangga, dan rasa kebersamaan kolektif. Konfigurasi ruang seperti itu mendemonstrasikan bahwa ruang bersama sosial tidak harus mewah atau formal; ruang sederhana pun bisa menjadi arena penting bagi kehidupan sosial sehari-hari, dialog antar warga, dan pemeliharaan kerukunan sosial.

Lebih lanjut, penelitian terhadap ruang terbuka hijau atau ruang publik perkotaan juga menunjukkan bahwa keberadaan ruang sosial strategis dapat mendukung interaksi, rekreasi, dan kohesi komunitas, meskipun sering berkaitan dengan tekanan ekonomi atau komersialisasi ruang. Sebagai contoh, dalam artikel di Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi (2025) tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kawasan urban menunjukkan bahwa meskipun ada dinamika alih

fungsi lahan dan kepentingan ekonomi, ruang hijau publik tetap terbukti memberi manfaat sosial-ekologis dan membuka peluang bagi interaksi komunitas, sebagai ruang sosial alternatif dalam lingkungan urban.

Selain itu, keberhasilan ruang bersama sosial sebagai basis interaksi sosial sangat bergantung pada pengelolaan komunitas, artinya, bukan hanya bentuk fisik ruang, tetapi juga kesepakatan sosial, toleransi, dan budaya kolektif yang mendasarinya. Dalam artikel “Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung” (dalam jurnal Unisia) ditegaskan bahwa ruang publik di kampung bisa menjadi wadah terciptanya modal sosial, asal ruang itu dikelola bersama oleh komunitas dan bukan dikuasai oleh segelintir pihak. Ruang bersama sosial semacam ini memungkinkan munculnya solidaritas, saling bantu, kesadaran kolektif, dan toleransi sebagai bagian dari praktik harian warga.

Dengan demikian, konsep ruang bersama sosial menjadi sangat strategis dalam membangun kohesi sosial, toleransi, dan moderasi antarkelompok. Ruang bersama sosial, apakah dalam bentuk gang kampung, rusunawa, ruang terbuka hijau, atau ruang

publik kota, berfungsi sebagai arena pertemuan, dialog, interaksi, dan solidaritas. Jika ruang ini didukung oleh nilai-nilai inklusif, penghormatan terhadap perbedaan, serta partisipasi komunitas, maka ia dapat menjadi basis praktis bagi hidup bersama yang harmonis di tengah keragaman.

B. Membangun Komunikasi Antarbudaya

Membangun komunikasi antarbudaya bermula dari pengakuan bahwa perbedaan budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan adalah kenyataan sosial yang harus didekati dengan sikap terbuka dan pembelajaran terus-menerus. Komunikasi antarbudaya bukan sekadar bertukar kata, melainkan proses membangun *shared meaning* yaitu makna bersama yang lahir dari usaha aktif untuk memahami perspektif lain, menempatkan diri pada posisi lawan bicara, dan menekan prasangka awal. Konsep dan dinamika komunikasi antarbudaya di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan proses ini sangat ditopang oleh kemampuan aktor sosial untuk mengadopsi strategi adaptasi budaya, misalnya penyesuaian bahasa, sensitivitas simbolik, dan penghargaan terhadap norma lokal, sehingga

pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimaknai bersama.

Dalam praktik sehari-hari, pembangunan komunikasi antarbudaya efektif bila difasilitasi melalui ruang-ruang interaksi formal dan informal yang aman: asrama mahasiswa, sekolah, balai desa, kegiatan budaya bersama, dan forum dialog lintas komunitas. Studi kasus tentang peran asrama mahasiswa menunjukkan bagaimana aturan organisasi, program kebersamaan, dan kegiatan lintas daerah dapat menjadi laboratorium komunikasi antarbudaya, menumbuhkan kompetensi antarbudaya, menurunkan miskomunikasi, dan memperkuat jaringan sosial antarpelajar dari berbagai provinsi. Dengan kata lain, institusi pendidikan dan asrama berfungsi sebagai wahana praktis untuk melatih empati, kemampuan mediasi, serta keterampilan komunikasi yang sensitif budaya.

Pendekatan antropologis dan kultural juga memperkaya strategi pembangunan komunikasi antarbudaya: menghargai kearifan lokal, memasukkan praktik adat dalam dialog, dan menggunakan media budaya (musik, ritual, bahan cerita) sebagai jembatan makna antara kelompok

berbeda. Misalnya penelitian tentang interaksi budaya Arab Hadramaut dengan etnis Kaili di Palu atau studi Seba Baduy menegaskan bahwa pemahaman praktik budaya setempat dan sikap *open culture* mempercepat proses adaptasi budaya dan meminimalkan konflik interpretasi. Oleh karena itu, program komunikasi antarbudaya yang efektif selalu memasukkan unsur studi lapangan, observasi partisipatif, dan pengakuan terhadap norma lokal sebagai bahan dialog.

Membangun komunikasi antarbudaya juga menuntut perhatian pada hambatan struktural: perbedaan bahasa daerah, segregasi sosial, stereotip, dan kurangnya wadah komunikasi. Penelitian-penelitian kualitatif di komunitas Jawa-Madura dan komunitas lain menunjukkan bahwa hambatan bahasa dan prasangka antar-kelompok sering menjadi sumber miskomunikasi; oleh karena itu program intervensi yang menyasar kemampuan bahasa bersama, kegiatan budaya campuran, dan pelatihan pengurangan ketidakpastian komunikasi sangat berguna. Selain itu, kebijakan lokal yang memberikan ruang publik bagi pertemuan lintas budaya, misalnya pendanaan kegiatan lintas agama, renovasi balai pertemuan, atau kurikulum

sekolah yang inklusif, akan memperkuat praktik komunikasi antarbudaya secara lestari.

C. Strategi Menciptakan Kehidupan yang Inklusif

Menciptakan kehidupan yang inklusif dimulai dari ranah pendidikan formal dan nonformal; sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi harus menjadi laboratorium praktik inklusi yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan secara sistematis. Kurikulum yang memasukkan pendekatan multikultural, bahan ajar yang merepresentasikan berbagai identitas, serta metode pembelajaran dialogis dan partisipatif membantu peserta didik memahami keberagaman bukan sebagai ancaman tetapi sebagai sumber kekayaan sosial. Implementasi pembelajaran agama yang inklusif, misalnya pembelajaran PAI yang sensitif terhadap konteks plural, menunjukkan bahwa pendidikan mampu membentuk sikap toleran sejak usia dini, mengurangi prasangka, dan membangun kapasitas kritis siswa untuk menolak retorika intoleran. Pendekatan ini telah didokumentasikan dalam studi-studi implementasi pendidikan inklusif dan pendekatan multikultural di sekolah-sekolah

Indonesia, yang menunjukkan pengaruh nyata terhadap sikap siswa dan iklim sekolah.

Ruang publik dan ruang bersama, baik fisik seperti balai desa, taman, asrama, atau ruang virtual seperti forum komunitas online, harus dirancang dan difungsikan sebagai arena pertemuan lintas budaya yang aman. Desain ruang yang mudah diakses, program kegiatan bersama (gotong royong, festival budaya, layanan sosial), serta kebijakan penggunaan ruang yang adil mendorong pertemuan antar-kelompok yang bersifat rutin dan bermakna; interaksi semacam ini menumbuhkan modal sosial, mengurangi stereotip, dan memperkuat jaringan antarwarga. Penelitian tentang perancangan ruang interaksi di permukiman dan efektivitas asrama/ruang kampus sebagai wahana pembelajaran antarbudaya menunjukkan bahwa ketersediaan wadah bertemu yang terstruktur secara sosial dan fisik merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan inklusi pada tingkat lokal.

Pemanfaatan teknologi digital dan platform media sosial dapat menjadi strategi progresif untuk memperluas jangkauan inklusi apabila dikelola secara bijak: kampanye pendidikan moderasi di kanal YouTube, forum dialog daring antar-umat,

serta literasi digital untuk mengidentifikasi disinformasi terbukti membantu mengurangi polarisasi dan menyebarkan narasi toleransi. Namun efektivitasnya bergantung pada kapasitas literasi digital masyarakat dan desain intervensi yang mendorong partisipasi konstruktif, bukan sekadar penyebaran informasi satu arah. Studi terkini yang menelaah penggunaan platform digital untuk dialog antaragama dan kampanye moderasi memperlihatkan potensi tinggi namun juga menegaskan perlunya strategi konten, fasilitator yang kompeten, dan langkah mitigasi terhadap ujaran kebencian di ruang maya.

Peran aktor lokal, tokoh agama, tokoh adat, guru, dan pemimpin komunitas, merupakan kunci operasionalisasi inklusi. Tokoh yang dihormati dapat menjadi jembatan legitimasi moral dan budaya untuk mengadvokasi praktik inklusif: dari pidato yang merefleksikan nilai-nilai keberagaman, fasilitasi mediasi konflik, hingga inisiasi program bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara institusi agama dan institusi pendidikan (misalnya laboratorium agama inklusif di kampus) menunjukkan model efektif: legitimasi keagamaan dikombinasikan dengan strategi

pedagogis dapat menghasilkan kebijakan lokal dan praktik sosial yang lebih toleran dan berkelanjutan. Penelitian lapangan di berbagai komunitas akademik dan keagamaan di Indonesia memperkuat bukti bahwa kepemimpinan lokal yang pro-inklusi berpengaruh signifikan terhadap iklim toleransi di tingkat mikro.

Akhirnya, strategi kebijakan publik dan program berbasis komunitas harus saling melengkapi: regulasi yang melindungi kebebasan beragama, pendanaan untuk kegiatan lintas-komunitas, pelatihan fasilitator moderasi, serta evaluasi berbasis indikator kohesi sosial akan memperkuat dampak inisiatif lokal. Program yang berhasil menunjukkan kombinasi intervensi: kurikulum inklusif di sekolah, pelatihan literasi digital dan dialog bagi generasi muda, desain ruang publik yang memfasilitasi pertemuan, serta dukungan praktis bagi tokoh masyarakat untuk memediasi konflik. Ketika strategi-strategi ini dijalankan secara sinergis, dengan monitoring dan partisipasi warga, kehidupan inklusif menjadi bukan sekadar ideal, melainkan praktik sehari-hari yang terukur dan berkelanjutan. Studi studi evaluatif dan kajian kebijakan di Indonesia merekomendasikan model terpadu semacam ini

sebagai pendekatan yang paling efektif untuk mewujudkan inklusi sosial.

D. Praktik Resolusi Konflik yang Humanis

Praktik resolusi konflik yang humanis menempatkan martabat semua pihak sebagai pusat proses penyelesaian sehingga tujuan utama bukan sekadar “menang/kalah”, melainkan pemulihan hubungan sosial dan kesejahteraan bersama. Proses ini dimulai dengan penciptaan ruang aman untuk dialog, di mana mediator menjamin kesempatan sama bagi semua pihak untuk bicara, mendengar tanpa menghakimi, dan mengemukakan kerugian atau kekhawatiran mereka. Model seperti ini tampak efektif pada studi-studi kasus di berbagai komunitas Indonesia, di mana intervensi yang mengedepankan dialog terstruktur dan partisipatif berhasil menurunkan eskalasi konflik dan memperkuat komitmen bersama terhadap norma damai.

Dalam praktik lapangan, mediasi komunitas sering kali memadukan teknik mediasi modern dengan kearifan lokal, sebuah pendekatan hibrida yang menjaga relevansi budaya sekaligus memanfaatkan metoda fasilitasi yang sistematis. Pendekatan hibrida ini mengakui otoritas tokoh adat

atau ritual lokal sebagai sumber legitimasi sosial, tetapi juga memperkenalkan proses pencatatan kesepakatan, komitmen tertulis, dan tata laksana pemantauan yang biasa dipakai mediator profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kearifan lokal dipadankan dengan praktik mediasi modern, hasil perdamaian cenderung lebih berkelanjutan karena memperoleh legitimasi budaya sekaligus mekanisme penegakan sosial.

Peran tokoh lokal, tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat, sering menentukan keberhasilan penyelesaian konflik secara humanis. Tokoh-tokoh ini tidak hanya memfasilitasi dialog, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga proses rekonsiliasi: memberi saran, membentuk forum musyawarah, dan memfasilitasi ritual peneguhan kembali hubungan sosial. Studi kasus resolusi berbasis budaya di Surakarta dan penelitian mediasi masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh adat/Tokoh agama memudahkan penerimaan keputusan di komunitas karena keputusan itu dipandang sebagai kelanjutan praktik sosial yang telah lama hidup. Ketika tokoh lokal menjadi mediator yang netral dan berintegritas,

proses rekonsiliasi berlangsung lebih cepat dan hasilnya lebih diterima.

Pemanfaatan media dan teknologi juga menjadi bagian praktik resolusi konflik modern yang humanis apabila digunakan untuk membangun narasi rekonsiliasi, bukan memperuncing polarisasi. Artikel-artikel yang menelaah peran media sosial dalam konteks isu SARA menegaskan dua hal: media sosial dapat mempercepat penyebaran kebencian, tetapi juga punya potensi besar sebagai platform edukasi, klarifikasi fakta, dan inisiasi dialog antar-komunitas bila dikelola dengan strategi literasi digital dan fasilitasi konten yang konstruktif. Oleh karena itu, strategi resolusi yang humanis termasuk kampanye literasi digital, kanal klarifikasi terpadu, dan forum daring yang dimoderasi untuk menampung aspirasi korban dan pihak lain secara adil.

Akhirnya, praktik resolusi konflik yang humanis mengedepankan prinsip keadilan restoratif, fokus pada pemulihan hubungan, pengakuan kerugian, dan upaya perbaikan, daripada sekadar hukuman. Dalam banyak konteks komunitas di Indonesia, upaya restoratif ini diwujudkan lewat permintaan maaf terbuka, kompensasi simbolis atau praktis, serta komitmen bersama untuk membangun

mekanisme pencegahan ulang konflik. Pendekatan seperti ini efektif karena menggabungkan aspek emosional (pengakuan, empati) dan praktis (komitmen perbaikan), sehingga perdamaian yang dihasilkan lebih tahan lama. Studi-studi kasus dan kajian pola resolusi konflik menggarisbawahi pentingnya melibatkan aktor lokal, menyediakan proses yang transparan, dan menjaga kesinambungan tindak lanjut setelah kesepakatan dicapai.

E. Penguatan Solidaritas di Tengah Perbedaan

Penguatan solidaritas di tengah keberagaman menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Solidaritas tidak hanya berarti saling membantu, tetapi juga menumbuhkan rasa keterhubungan emosional dan sosial antarkelompok, terutama dalam masyarakat multikultural. Menurut Haryanto (2015) dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, solidaritas sosial dalam masyarakat majemuk dapat tumbuh melalui interaksi yang intens, kerja sama, dan komunikasi antaranggota komunitas yang berbeda suku, agama, maupun budaya. Interaksi semacam ini menciptakan rasa saling memahami dan

mengurangi prasangka, sehingga masyarakat dapat membangun hubungan sosial yang lebih stabil dan harmonis. Di Indonesia, nilai-nilai lokal seperti gotong royong terbukti menjadi modal sosial yang memperkuat solidaritas.

Lubis (2017) dalam *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* menjelaskan bahwa gotong royong mampu menjadi perekat yang melampaui batas kelompok sosial dan menciptakan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan bersama.

Kajian internasional juga menunjukkan bahwa keberagaman dapat memperkuat solidaritas bila diiringi dengan kontak sosial yang positif. Putnam (2007) dalam *Scandinavian Political Studies* menjelaskan bahwa masyarakat yang berhasil memperkuat kohesi sosial pada akhirnya mampu mengubah keberagaman menjadi kekuatan kolektif, meskipun pada tahap awal keberagaman dapat memicu sikap saling menjaga jarak. Meta-analisis Pettigrew dan Tropp (2006) membuktikan bahwa kontak antarkelompok yang setara, dibangun melalui kerja sama, dan difasilitasi oleh norma atau institusi inklusif, secara signifikan menurunkan prasangka dan meningkatkan solidaritas. Hasil penelitian ini

sejalan dengan kondisi di Indonesia, di mana berbagai kegiatan kolaboratif seperti program desa inklusif, kegiatan antarumat beragama, dan aksi kemanusiaan lintas komunitas terbukti memperkuat solidaritas sosial dan mempersempit jurang perbedaan.

Di level komunitas, solidaritas diperkuat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang bersifat lintas identitas. Mandala (2018) menegaskan bahwa partisipasi publik dalam kegiatan bersama menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan sosial, dua komponen penting dalam kohesi sosial. Selain itu, Gunawan (2019) dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius* menunjukkan bahwa toleransi, empati, dan sikap saling mendukung merupakan faktor utama dalam memperkuat solidaritas masyarakat plural. Ketika masyarakat terbiasa terlibat dalam ruang sosial bersama, baik melalui musyawarah warga, kegiatan seni dan budaya, maupun aksi spontanitas seperti bantuan bencana, mereka belajar untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya identitas kolektif, bukan sebagai alasan untuk saling menjauh.

Dengan demikian, penguatan solidaritas di tengah perbedaan membutuhkan dukungan

berlapis: interaksi sosial yang intens, institusi yang inklusif, ruang komunikasi antarbudaya yang terbuka, serta nilai-nilai lokal yang menjaga kebersamaan. Solidaritas tidak tumbuh sendirinya, tetapi dibangun secara sadar melalui praktik sosial sehari-hari yang mendorong kolaborasi dan memperkuat kepercayaan di antara berbagai kelompok masyarakat.

PENUTUP



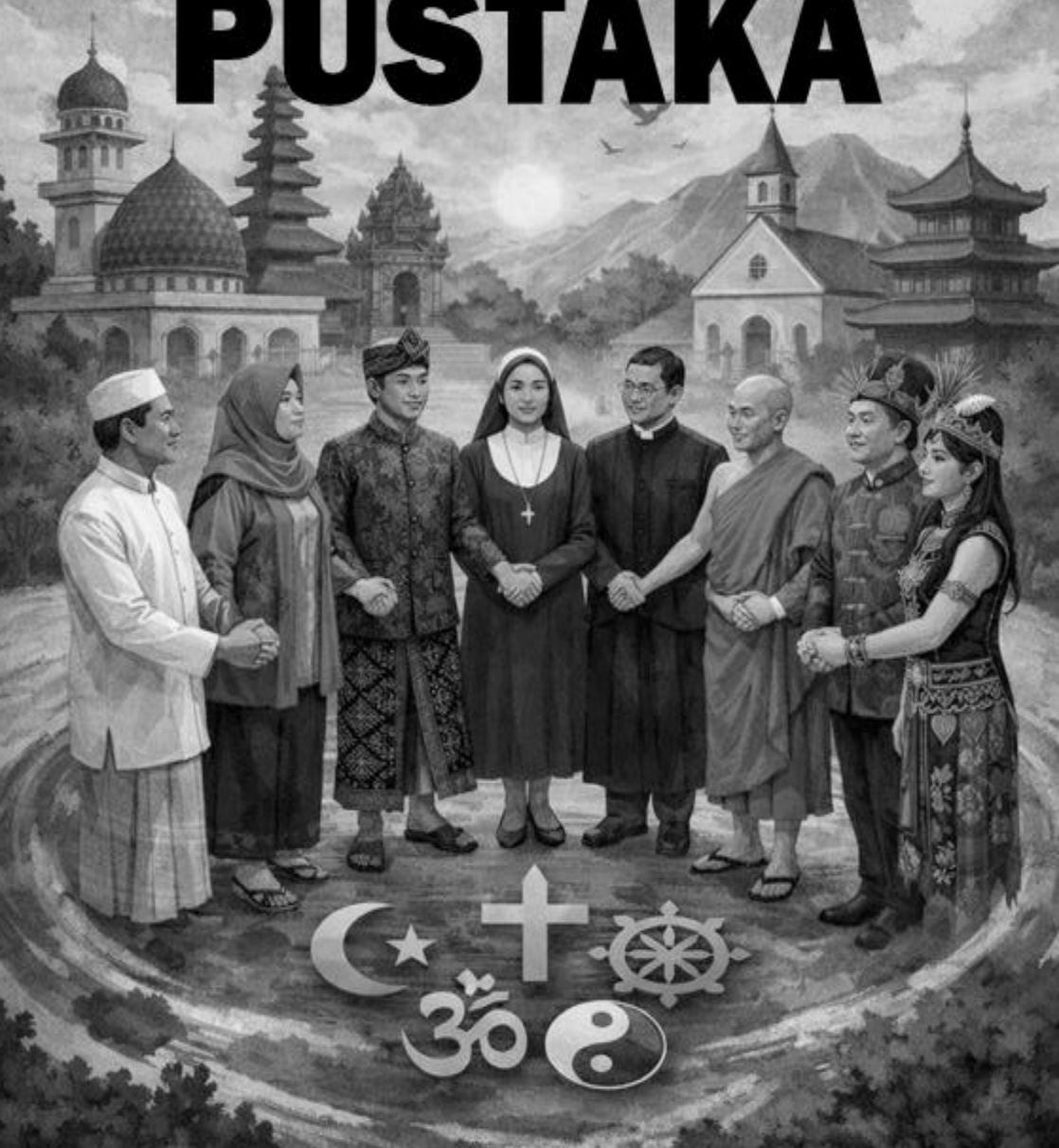
PENUTUP

Keberagaman keyakinan dan budaya merupakan bagian nyata dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi tersebut, moderasi religiusitas menjadi pijakan penting untuk menumbuhkan cara pandang beragama yang seimbang, adil, dan mengedepankan kepentingan bersama. Sikap moderat memungkinkan perbedaan disikapi secara arif sehingga dapat memperkuat persatuan, bukan sebaliknya. Mewujudkan ruang kebersamaan memerlukan keterbukaan sikap, kemauan berdialog, serta kesadaran untuk saling menghargai. Nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap sesama menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan di tengah kemajemukan. Moderasi religiusitas tidak bertujuan melemahkan keyakinan, melainkan meneguhkan praktik beragama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Diharapkan gagasan-gagasan yang disampaikan mampu menjadi bahan renungan sekaligus penguat tekad bersama untuk membangun kehidupan yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Dengan semangat tersebut, ruang-ruang kebersamaan dapat terus

dikembangkan sebagai penopang persatuan dalam masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Aurana Zahro El Hasbi, Noor Fuady 2024. "Moderasi beragama, tasamuh, dan sinkretisme(dinamika sosial keagamaan umat islam)"; *jurnal Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 2 No 1 Hal 169–182.
- Baihaqi, I. (2024). Moderasi religius sebagai fondasi toleransi dan harmoni sosial. *Majemuk: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 130–137.
- Elly Warnisyah Harahap, Sufriyansyah, Wedi Samsudi, Nofal Liata dan Khairil Fazal 2021. "Multikultural Perspektif Sosiologis, Jurnal Studi Agama-Agama, 1(2).
- Febrian Jordan Manalu, Apriliana Lase 2024. "Multikulturalisme: konsep, dampak, dan strategi pengelolaan keragaman budaya dalam konteks global", *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2 (6): 357–362
- Karim, S. A. (2025). Pentingnya moderasi beragama dalam memperkuat persaudaraan lintas iman. *Spiritus: Jurnal Studi Agama dan Pendidikan*, 3(1).
- Khoerunisa, S., & Yuliani, S. (2025). Moderasi beragama dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama*, 2(2), 78–89.
- Maulana, M., Putri, N. N. A., & Fahira, Z. (2024). Moderasi beragama dalam masyarakat multikultural

- Indonesia. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 47(1), 61–76.
- Purwanto 2023. “Multikulturalisme’ dan Pendidikan Multikultural”, *Jurnal Program Studi PGMI Vol. 10, No. 3*.
- Putu Ida Arsani Dewi, 2023. “Moderasi hindu dalam tri kerangka agama hindu di bali”, *jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan*, Vol 1 No 1 Hal 91-100.
- Rasyidi, K., Saiban, & Rozikin, Z. (2025). Membangun masyarakat inklusif melalui desa moderasi beragama. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 151–175.
- Setyaningrum, A. (2003). “*Multikulturalisme sebagai identitas kolektif, kebijakan politik dan realitas sosial*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 243–260.
- Zahra Nabilah , Ilham Hudi, Siti Bella dkk. 2024. “Tantangan Multikulturalisme Terhadap Solidaritas Kewarganegaraan Dalam Masyarakat Majemuk”, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2(9): 82–89.

BIODATA PENULIS



Dina Risti Yuliati lahir di Wonosobo pada tanggal 7 Maret 2004. Dina lulusan dari TK Pertiwi III pada tahun 2010 dan melanjutkan Pendidikan Dasar di SD N 1 Wadaslintang lulus pada tahun 2016 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wadaslintang lulus tahun 2019 kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Wadaslintang dengan jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Setelah itu lulus tahun 2022 melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas PGRI Yogyakarta dengan mengambil program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.



Supri Hartanto, M.Pd., lahir di Yogyakarta, aktif mengajar dalam bidang media. Beliau adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.

MEMBANGUN RUANG BERSAMA

Moderasi Religiusitas di Tengah Ragam Budaya dan Keyakinan

Buku Membangun Ruang Bersama: Moderasi Religiusitas di Tengah Ragam Budaya dan Keyakinan mengulas pentingnya sikap moderat dalam beragama sebagai fondasi kehidupan sosial yang damai di tengah keberagaman Indonesia. Berangkat dari kegelisahan penulis terhadap meningkatnya polarisasi, disinformasi, dan kecenderungan eksklusivisme beragama, buku ini menegaskan bahwa pluralitas bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui dialog, saling pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan serta budaya.

Melalui pembahasan yang reflektif dan kontekstual, buku ini menawarkan moderasi religiusitas sebagai panduan etis yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, dengan menyoroti peran budaya lokal, nilai kemanusiaan, serta strategi membangun ruang bersama yang inklusif sebagai upaya memperkuat harmoni sosial dan persatuan bangsa. Karya ini diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa, pendidik, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap masa depan toleransi dan keberagaman Indonesia.



ISBN 978-634-96654-0-7 (PDF)



9

786349

665407



TIGA EDUKASI GLOBAL

Belajar, Berkembang, Berprestasi

CV. Tiga Edukasi Global

Jl. Letkol Soebadri, Gang Tanjung Anom,
Sleman, Triharjo, Yogyakarta 55515

Telp: 0812-5002-3984

Email: tigaedukasiglobal@gmail.com

www.tigaedukasiglobal.co.id